



SEKOLAH MENULIS & KAJIAN MEDIA (SMKM-Atjeh) PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA:

IBRAHIM CHALID

SEBAGAI: PEMATERI

SMKM Angkatan II

MATERI: MEDIA LITERACY

Lhokseumawe, 28 Mei 2012

MANAGER PELSAKSANA



DeRE
Developing Research and Empowerment

Muhammad Ilyas

Head Office : Head Office : Jln. Keramat Jaya No. 6b - Kel. Sp. Empat - Banda Sakti - Lhokseumawe - 24300

Branch Office: Jln. Tgk. Inum Lung Bata No. 2 Lungbata - Banda Aceh - Aceh

Email : sekolah.menulis2012@media@gmail.com / <http://smkmatjeh.wordpress.com>

Media Literasi Proses Menuju Pendidikan Multikultural*

Oleh: Ibrahim Chalid**

Abstrak

Media literasi merupakan sebuah aktivitas yang mengkaji isi media dengan sikap kritis terhadap pemberitaan media yang terkadang dapat mempengaruhi perilaku. Pemaknaan berita media yang beragam sangat memungkinkan terjadinya bias dan menimbulkan sikap yang bervariasi sesuai dengan tingkat pendidikan para pembacanya. Untuk menghindari bias tersebut media harus bertanggungjawab terhadap resiko dari pemberitaan yang dimuat dalam sebuah media, walaupun disisi lain media memainkan peran yang besar dalam proses melahirkan pendidikan yang multikultural.

Kata Kunci : Media, literasi, Multikultural

I. Pengertian Media Literasi.

Secara umum literasi media dapat diartikan adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan isi pesan media. Istilah literasi media mungkin belum begitu akrab di telinga kita. Masyarakat mungkin masih terheran dan kurang paham jika ditanya apa sebenarnya literasi media tersebut. Para ahli pun memiliki konsep yang beragam tentang pengertian literasi media, McCannon mengartikan literasi media sebagai kemampuan secara efektif dan secara efisien memahami dan menggunakan komunikasi massa (Strasburger & Wilson, 2002). Ahli lain James W Potter (2005) mendefinisikan literasi media sebagai satu perangkat perspektif dimana kita secara aktif memberdayakan diri kita sendiri dalam menafsirkan pesan-pesan yang kita terima dan bagaimana cara mengantisipasinya.

* Makalah ini disampaikan pada acara Sekolah Menulis dan Kajian Media (SMKM – Atjeh) Angkatan II yang diselenggarakan oleh DeRe-Indonesia di Lhokseumawe 28 Mei 2012.

** Dosen Program Studi Antropologi Universitas Malikussalah.

Menurut Silverblatt (1995) ada 5 elemen utama dalam memahami media literasi yaitu : Pertama adalah Sebuah kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat. Kedua, sebuah pemahaman akan proses komunikasi massa. Ketiga, Pengembangan strategi-strategi yang digunakan untuk menganalisis dan membahas pesan-pesan media. Keempat, Sebuah kesadaran akan isi media sebagai ‘teks’ yang memberikan wawasan dan pengetahuan ke dalam budaya kontemporer manusia dan diri manusia sendiri, dan. Kelima Peningkatan kesenangan, pemahaman dan apresiasi terhadap isi media.

Secara teoritis, Literasi media diantaranya didefinisikan sebagai “kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan suatu pesan dalam berbagai bentuk (Aufderheide: 1993). Potter (2004) mendefinisikan literasi media sebagai “kerangka perspektif dari mana kita mengekspos diri untuk media dan menafsirkan makna dari pesan yang kita hadapi” (Potter dalam Martens: 2010). *Media literacy* adalah Kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan (*National leadership Confrence on Media literacy, 1992*).

Di Indonesia, dengan jumlah penonton dan pengguna internet yang tinggi, bukan hanya menjadi sebuah capaian yang positif. Tetapi, timbul juga masalah-baru. Misalnya, banyak sekali konten televisi selalu menciptakan stereotip-stereotip pada kelompok masyarakat tertentu, banyak juga tayangan hiburan yang saling mengeluarkan kalimat-kalimat melecehkan. Dalam media online, beberapa waktu yang lalu terjadi pemblokiran belasan situs Islam, karena dinilai menyebarkan ajaran radikal (metrotvnews.com). Televisi dan juga media online sama-sama menghadirkan efek yang mengganggu keberlangsungan multikulturalisme di Indonesia.

Sehingga, literasi media dikhalayak sangat penting, agar mengerti bahwa apa yang disampaikan dalam pesan-pesan media tidak semua benar dan bernilai positif, khalayak dituntut untuk cerdas dan analitik dalam mengkonsumsi pesan media. Jika hal tersebut terwujud, maka khalayak atau masyarakat tidak terpengaruh terhadap isu dan propoganda yang dimainkan oleh sekelompok orang yang berkepentingan dan meminimalisir konflik yang mungkin terjadi. Singkatnya, dengan literasi media masyarakat juga dididik multikultural. Artinya, pentingnya literasi media adalah untuk membangun struktur pengetahuan yang baik dalam memahami kemultikulturalan masyarakat melalui pesan-pesan media massa.

Literasi media sangat dibutuhkan agar masyarakat menjadi cerdas. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengomunikasikan pesan, sehingga dapat memilih mana media yang baik dan mana yang buruk. Demokrasi saat ini akan sulit ditegakkan, jika masyarakatnya tidak melek media. Media massa, sebagai salah satu pilar demokrasi, dapat berperan optimal jika masyarakatnya melek media. Bagaimana melek media bermanfaat bagi orang awam. Dalam era teknologi informasi yang berkembang demikian cepatnya, dimana kita sekarang sedang dikepung dan dibanjiri oleh informasi, tidak ada cara lain selain “masuk” terlibat di dalamnya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada jalan keluar, jalan lain untuk lari dari “kejaran” informasi. Kita membutuhkan informasi untuk mampu bertahan di era ini, demikian juga kita harus mampu memproduksi informasi dengan benar

Media massa sebagai ruang publik dituntut menjadi media dalam pendidikan multikultural (Maxwell McCombs: 2011) ke masyarakat. Media massa mempunyai kemampuan menyebarkan informasi secara serentak pada khalayak yang beragam dan media mempunyai kekuatan dalam membentuk opini (Rodger Harding: 2009). Media massa bisa jembatan dalam membentuk interpretasi masyarakat terhadap kemultikulturalan masyarakat Indonesia. Karena, Media massa

telah menjadi konsumsi kebanyakan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini tinggal dalam sebuah rumah tangga dengan akses media yang melimpah dan terpenuhi kebutuhannya. Melalui televisi mereka dapat menonton 11 nasional (terrestrial) saluran TV dan beberapa 105 stasiun TV lokal, kebanyakan dari mereka disiarkan selama 24 jam per hari (Hendriyani dan Guntarto: 2011). Bukan hanya televisi, media sosial juga telah berubah menjadi media dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Yaitu, mencapai 88 juta (APJII dalam Metrotvnews.com: 2014).

II. Media, Pendidikan Multikultural Di Indonesia.

Dalam perkembangannya, Indonesia sebagai negara yang multikultur dan fenomena dampak media yang terus meningkat, dipandang perlu pada kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan baru dan kompetensi yang memungkinkan pengguna dan konsumen literasi informasi dan media. Karena, dengan media bisa sangat berperan dalam mendorong terbentuknya masyarakat multikultural (Kriyantono: 2012). Sedangkan, Untuk melakukan pendidikan literasi media (Mao Chun, dong xiaoyu: 2015) dibutuhkan strategi yang tidak sederhana dan beragam, yang sesuai dengan lingkungan, budaya dan kemampuan kognitif khalayaknya. Sehingga, perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang literasi media.

Globalisasi merupakan suatu dunia yang di dalamnya tanpa batas dan menenbus nilai-nilai luhur yang dulunya dianggap tabu baik dalam bertingkah laku maupun dalam menjalankan hidup sehari-hari. Globalisasi di mulai dengan penggunaan teknologi dalam seluruh unsure kehidupan serta mengedepankan penguasaan informasi sebagai alat untuk memenuhi semua kebutuhan hidup.

Kehidupan global adalah hidup dengan cara terbuka, tanpa ada pembatas baik nilai maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itu ada konsep multikulturalisme tumbuh dan subur dalam kehidupan manusia modern, begitu juga dengan dunia pendidikan.

Walaupun multikulturalisme itu telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia tetapi bagi pada umumnya orang Indonesia masa kini multikulturalisme adalah adalah sebuah konsep asing. Saya kira perlu adanya tulisan-tulisan yang lebih banyak oleh para ahli yang kompeten mengenai multikulturalisme di media massa daripada yang sudah ada selama ini. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme akan harus mau tidak mau akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas

Kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropah Barat maka sampai dengan Perang Dunia ke-2 masyarakat-masyarakat tersebut hanya mengenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan Kulit Putih yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat-masyarakat tersebut digolongkan sebagai minoritas dengan segala hak-hak mereka yang dibatasi atau dikebiri. Di Amerika Serikat berbagai gejolak untuk persamaan hak bagi golongan minoritas dan kulit hitam serta kulit berwarna mulai muncul di akhir tahun 1950an. Puncaknya adalah pada tahun 1960an dengan dilarangnya perlakuan diskriminasi oleh orang Kulit Putih terhadap orang Kulit Hitam dan Berwarna di tempat-tempat umum, perjuangan Hak-Hak Sipil, dan dilanjutkannya perjuangan Hak-Hak Sipil ini secara lebih

efektif melalui berbagai kegiatan *affirmative action* yang membantu mereka yang tergolong sebagai yang terpuruk dan minoritas untuk dapat mengejar ketinggalan mereka dari golongan Kulit Putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam berbagai bidang pekerjaan dan usaha.

Di tahun 1970an upaya-upaya untuk mencapai kesederajatan dalam perbedaan mengalami berbagai hambatan, karena corak kebudayaan Kulit Putih yang Protestan dan dominan itu berbeda dari corak kebudayaan orang Kulit Hitam, orang Indian atau Pribumi Amerika, dan dari berbagai kebudayaan bangsa dan sukubangsa yang tergolong minoritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Nieto (1992) dan tulisan-tulisan yang di-edit oleh Reed (1997). Yang dilakukan oleh para cendekiawan dan pejabat pemerintah yang pro demokrasi dan HAM, dan yang anti rasisme dan diskriminasi adalah dengan cara menyebarkan konsep multikulturalisme dalam bentuk pengajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah di tahun 1970an. Bahkan anak-anak Cina, Meksiko, dan berbagai golongan sukubangsa lainnya dewasa ini dapat belajar dengan menggunakan bahasa ibunya di sekolah sampai dengan tahap-tahap tertentu (Nieto 1992). Jadi kalau Glazer (1997) mengatakan bahwa '*we are all multiculturalists now*' dia menyatakan apa yang sebenarnya terjadi pada masa sekarang ini di Amerika Serikat, dan gejala tersebut adalah produk dari serangkaian proses-proses pendidikan multikulturalisme yang dilakukan sejak tahun 1970an.

Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan diantara para ahli harus dipersamakan atau setidaknya tidak dipertentangkan antara satu konsep yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep yang dipunyai oleh ahli atau ahli-ahli lainnya. Karena multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif

fungsinya bagi kehidupan manusia. Saya melihat kebudayaan dalam perspektif tersebut dan karena itu melihat kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Yang juga harus kita perhatikan bersama untuk kesamaan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu operasional melalui pranata-pranata sosial.

Sebagai sebuah ide atau ideologi multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antar-manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.

Salah satu isu yang saya kira cukup penting untuk diperhatikan di dalam kajian-kajian mengenai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya adalah corak dari kebudayaan manajemen yang ada setempat, atau pada corak kebudayaan korporasi bila perhatian kajian terletak pada kegiatan pengelolaan manajemen sumber daya dalam sebuah korporasi. Perhatian pada pengelolaan manajemen ini akan dapat menyingkap dan mengungkapkan seperti apa corak nilai-nilai budaya dan operasionalisasi nilai-nilai budaya tersebut atau etos, dalam pengelolaan manajemen yang dikaji. Kajian seperti ini juga akan dapat menyingkap dan mengungkap seperti apa corak etika (*ethics*) yang ada dalam struktur-struktur kegiatan sesuatu pengelolaan manajemen yang memproses masukan (*in-put*) menjadi keluaran. (*out-put*). Apakah memang ada pedoman etika dalam setiap struktur manajemen, ataukah tidak ada pedoman etikanya, ataukah pedoman etika itu ada yang ideal (yang dicita-citakan dan yang dipamerkan) dan yang

aktual (yang betul-betul digunakan dalam proses-proses manajemen dan biasanya disembunyikan dari pengamatan umum.

Permasalahan etika ini menjadi sangat penting dalam pengelolaan manajemen sumber daya yang dilakukan oleh berbagai organisasi, lembaga, atau pranata yang ada dalam masyarakat. Negeri kita kaya raya akan sumber-sumber daya alam dan kaya akan sumber-sumber daya manusia yang berkualitas. tetapi pada masa sekarang ini kita, bangsa Indonesia, tergolong sebagai bangsa yang paling miskin di dunia dan tergolong ke dalam bangsa-bangsa yang negaranya paling korup. Salah satu sebab utamanya adalah karena kita tidak mempunyai pedoman etika dalam mengelola sumber-sumber daya yang kita punyai. Pedoman etika yang menjamin proses-proses manajemen tersebut akan menjamin mutu yang dihasilkannya. Kajian-kajian seperti ini bukan hanya menyingkap dan mengungkapkan ada tidaknya atau bercorak seperti apa nilai-nilai budaya yang berlaku dan etika yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan manajemen sesuatu kegiatan, organisasi, lembaga, atau pranata; tetapi juga akan mampu memberikan pemecahan yang terbaik mengenai pedoman etika yang seharusnya digunakan menurut dan sesuai dengan konteks-konteks macam kegiatan dan organisasi

Di tengah-tengah krisis yang akut dan kuatnya arus globalisasi. Mestinya pendidikan menjadi modal utama dalam mencerdaskan bangsa. Sesuai dengan amanah UUD 45 alokasi dana buat pendidikan sekira 20%. Kini, Pendidikan pun harus ditebus dengan biaya yang mahal. Seolah-olah kita mengamini pernyataan Eko Prasetyo 'Orang miskin di larang sekolah'. Apalagi beberapa pekan kebelakang hasil ujian nasional (UN) anak didik cukup memperhatikan. Mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Pendidikan Pertama (SLTP), sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Konsep pendidikan multikultural di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada, bukan hal baru lagi. Mereka telah melaksanakannya khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam, yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional.

Pendidikan multikultural (multicultural education) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa (Hilliard, 1991-1992). Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnic, ras, budaya, strata sosial dan agama.

Pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang "interkulturalisme" seusai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran "interkulturalisme" ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Mengenai fokus pendidikan multikultural, bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya

menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap "peduli" dan mau mengerti (difference), atau "politics of recognition" politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap "indifference" dan "Non-recognition" tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang 'ethnic studies' untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (empowerment) bagi kelompok-kelompok minoritas dan disadvantaged.

Istilah "pendidikan multikultural" dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama: bahaya diskriminasi: penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain.

Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan, yaitu: pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Keempat pendidikan dwi-budaya. Kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.

Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu: **Pertama**, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (education) dengan persekolahan (schooling) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif self sufficient, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotip

menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi. **Kelima**, kemungkinan bahwa pendidikan bahwa pendidikan (baik dalam maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikhotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.

Kepustakaan

Bloemraad, Matthew. *“Utter Failure” or Unity out of Diversity? Debating and Evaluating Policies of Multiculturalism.* the Center for Migration Studies of New York. 2014

Hendriyani & Guntarto, B. *Defining Media Literacy in Indonesia.* Paper presented at the International Association of Media Communication Research, Istanbul, Turkey. 2011

Potter, W. James (2004). *Theory of Media Literacy: A Cognitive Approach.* London:

Sage. Potter, W. James (2005). *Media Literacy. Third Edition.* London: Sage.

rinasyams@gmail.com